

## PENGARUH UKURAN DEWAN KOMISARIS, KEPEMILIKAN SAHAM PUBLIK DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PADA PERUSAHAAN SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

YAN CHRISTIN BR. SEMBIRING<sup>1</sup>

HANA YONA ANGGRESIA TAMBUNAN<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Ekonomi Program studi Akuntansi Universitas Katolik Santo Thomas  
yanchristin11@gmail.com, [hanayonatambunan13@gmail.com](mailto:hanayonatambunan13@gmail.com)

### ABSTRAK

Dewan Komisaris, Kepemilikan Saham Publik dan Kepemilikan Institusional terhadap pengungkapan Tanggung Jawab Sosial pada perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah 57 perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, sehingga diperoleh sampel 37 perusahaan, dengan periode penelitian 2 tahun sehingga total sampel yang diteliti adalah 74. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dan pengujian hipotesis menggunakan uji t dan uji F dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Hasil uji secara parsial (uji t) menunjukkan Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan Tanggung Jawab Sosial, Kepemilikan Saham Publik tidak berpengaruh terhadap pengungkapan Tanggung Jawab Sosial, dan Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan Tanggung Jawab Sosial. Hasil uji secara simultan (uji F) menunjukkan bahwa variabel Ukuran Dewan Komisaris, Kepemilikan Saham Publik dan Kepemilikan Institusional secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan Tanggung Jawab Sosial pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

**Kata Kunci :** Ukuran Dewan Komisaris, Kepemilikan Saham Publik, Kepemilikan Institusional, Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

### PENDAHULUAN

Konteks pembangunan saat ini, tidak lagi menghadapkan perusahaan kepada tanggung jawab yang berpijak pada aspek keuntungan secara ekonomis semata, yaitu nilai perusahaan yang direfleksikan dalam kondisi keuangan, namun juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya. Perkembangan Pengungkapan tanggung jawab sosial tidak bisa terlepas dari konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*). Definisi pembangunan berkelanjutan menurut *The World Commission On Environment and Development* yang lebih dikenal dengan *The Brundtland Commission*, bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan mereka (Solihin, 2009).

Nor Hadi (2011) menyatakan bahwa orientasi perusahaan seharusnya bergeser dari yang diorientasikan untuk shareholder (shareholder orientation) dengan bertitik tolak pada 2 ukuran kinerja ekonomi (economic orientation) semata, ke arah kesinambungan lingkungan dan masyarakat (community) dengan memperhitungkan dampak sosial. Terjadinya pergeseran orientasi di dalam dunia bisnis dari shareholders kepada stakeholders telah disebut sebagai penyebab munculnya isu tanggung jawab sosial perusahaan (Danu, 2011). Global Compact Initiative (2002) menyebut pemahaman ini dengan 3P (profit, people, planet), yaitu tujuan bisnis tidak hanya mencari laba (profit), tetapi juga menyejahterakan orang (people), dan menjamin keberlanjutan hidup planet ini (Nugroho, 2007). Pengambilan keputusan ekonomi hanya dengan melihat kinerja keuangan suatu perusahaan, saat ini sudah tidak relevan lagi. Eipstein dan Freedman (1994), dalam Anggraini (2006), menemukan bahwa investor individual tertarik terhadap informasi sosial yang dilaporkan dalam laporan tahunan.

Pengungkapan tanggung jawab sosial adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial/lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang sering dianggap inti dari etika bisnis adalah bahwa perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomi dan legal (artinya kepada pemegang saham atau shareholder) tetapi juga kewajiban-kewajiban terhadap pihak-pihak lain yang berkepentingan (stakeholder) yang jangkauannya melebihi kewajiban-kewajiban di atas. Tanggung jawab sosial dari perusahaan terjadi antara sebuah perusahaan dengan semua stakeholder, termasuk di dalamnya adalah pelanggan atau customer, pegawai, komunitas, pemilik, pemilik atau investor, pemerintah, supplier bahkan juga kompetitor.

Dalam Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang diterapkan undang-undang ini serta pelaksanaannya. Jalal (2007) dalam Pian (2010) mengungkapkan bahwa dalam Undang-undang Perseroan Terbatas (UU PT) No. 40 tahun 2007 diuraikan pula bahwa Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan dan pelanggaran atas kewajiban tersebut akan dikenakan sanksi.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial diantaranya ukuran dewan komisaris, kepemilikan saham publik dan kepemilikan institusional.

Menurut Nurhkin (2010) dewan komisaris dianggap sebagai mekanisme pengendalian internal tertinggi, yang bertanggung jawab untuk memonitor tindakan manajemen puncak. Dewan komisaris memiliki peranan untuk menentukan strategi dan keputusan yang akan diambil oleh suatu perusahaan sehingga sukses atau tidaknya perusahaan ditentukan oleh strategi yang dipilih oleh dewan komisaris tersebut (Aji Nugroho 2011: 38).

Menurut Oktariani 2013, kepemilikan publik merupakan proporsi saham yang dimiliki oleh publik/masyarakat umum dan bukan institusi yang signifikan dalam suatu perusahaan. Publik sendiri adalah individu atau institusi yang memiliki kepemilikan saham di bawah 5% yang berada di luar manajemen dan tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan (Puspitasari, 2009). Sementara perusahaan perseroan (PT) yang memiliki saham perusahaan bersangkutan tidak dimasukkan dalam kategori publik.

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan berbentuk entitas seperti pemerintah, asuransi, dana pensiun, reksa dana, dan institusi lainnya (Angraini 2006). Politon dan Sri (2013) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan tingkat pengawasan yang lebih besar oleh pihak *investor institusional*.

Penelitian mengenai pengungkapan Tanggung Jawab Sosial masih penting dilakukan. Alasannya adalah bahwa pengungkapan Tanggung Jawab Sosial sangat diperlukan oleh pihak-pihak pengguna, khususnya Stakeholder untuk menilai kinerja perusahaan, untuk menilai return saham yang akan diperoleh, dan untuk menganalisis kelangsungan usaha perusahaan. Pemegang saham memerlukan informasi yang dapat dipercaya mengenai perusahaan untuk mengevaluasi prospek kinerjanya dimasa mendatang.

Berdasarkan fenomena diatas dan fenomena dari hasil penelitian terdahulu yang berbeda-beda, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Kepemilikan Saham Publik dan Kepemilikan Institusional Perusahaan terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia”.

## DASAR TEORI

### 1. Telaah Teori

#### a. Teori Stakeholder

Stakeholder theory mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, tetapi harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya (pemegang saham, kreditor, konsumen, pemasok, masyarakat, pemerintah, analis, dan pihak lain). Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan stakeholder kepada perusahaan tersebut (Handoko,2014).

Adanya teori stakeholder ini memberikan landasan bahwa suatu perusahaan harus memberikan manfaat bagi stakeholder-nya. Manfaat tersebut dapat diberikan dengan cara menerapkan program pengungkapan tanggung jawab sosial. Adanya program pengungkapan tanggung jawab sosial pada perusahaan diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan bagi karyawan, pelanggan, dan masyarakat sehingga diharapkan terjalin hubungan yang baik antara perusahaan dan lingkungan sekitarnya (Amalia,2016).

**b. Teori Agensi**

Teori agensi adalah dasar teori yang menjadi acuan dalam pelaksanaan praktik bisnis suatu perusahaan. Pada teori agensi ini para pemegang saham (stakeholders) merupakan pihak prinsipal sedangkan manajemen merupakan pihak agen (Borolla, 2011). Tetapi ada para manajer malah memanfaatkan dan melakukan tindakan untuk kepentingan pribadinya dan mengabaikan kepentingan para pemegang saham.

**c. Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial**

Tanggung jawab sosial perusahaan adalah suatu kewajiban bagi perusahaan untuk mengkomunikasikan semua kegiatan operasional dan non operasional perusahaan dan akibatnya terhadap sosial dan lingkungan sekitarnya. Pengungkapan tanggung jawab sosial sangat berkaitan dengan proses pembangunan berkelanjutan, maksudnya seluruh kegiatan operasional dan non operasional perusahaan tidak hanya untuk memenuhi dan memperoleh keuntungan dari aspek finansial saja, tetapi juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungan sekitarnya, berupa peningkatan kesejahteraan pegawai dengan peningkatan gaji dan tunjangan lainnya, pemberian bantuan terhadap korban bencana alam, pemberiaan beasiswa kepada mahasiswa yang berprestasi.

Pengungkapan Corporate Social Responsibility perusahaan diukur dengan CSRDI dihitung dengan Komponen Corporate Social Responsibility menurut Edy Rismanda Sembiring (2005) sebagai berikut : Lingkungan, Energi, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Lain-lain Tentang Tenaga Kerja, Produk, Keterlibatan Masyarakat, Umum. Memuat 12 item dari 90 item yang tidak sesuai untuk diterapkan dengan kondisi di Indonesia. Selanjutnya dilakukan penyesuaian dengan cara menghapus 12 item pengungkapan tersebut. Sehingga secara total tersisa 78 item pengungkapan tanggung jawab sosial di Indonesia.

**d. Ukuran Dewan Komisaris**

Dewan komisaris merupakan perwakilan para pemilik saham yang berperan menjadi pengawas kinerja perusahaan, termasuk didalamnya kinerja sosial perusahaan. Dengan jumlah dewan komisaris yang memadai maka akan memaksimalkan kinerja suatu perusahaan (Krisna dan Suhardianto, 2016). Dewan komisaris yang merupakan wakil bagi pihak prinsipal perusahaan dapat memengaruhi luasnya pengungkapan tanggung jawab sosial, dikarenakan dewan komisaris yang merupakan sebagai pelaksana tertinggi didalam perusahaan. Dirumuskan sebagai berikut :

$$UDK = \Sigma \text{ Dewan Komisaris Perusahaan}$$

**e. Kepemilikan Saham Publik**

Kepemilikan saham oleh publik maksudnya adalah jumlah saham yang dimiliki oleh publik. Publik yang dimaksud adalah individu atau institusi yang memiliki saham suatu perusahaan di bawah 5% selain manajemen serta tidak mempunyai hubungan istimewa dengan perusahaan. Sementara institusi yang memiliki saham signifikan perusahaan bersangkutan tidak disertakan dalam kategori publik. Dirumuskan sebagai berikut :

$$\% \text{ Kepemilikan saham publik} = \frac{\text{jumlah saham publik}}{\text{jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

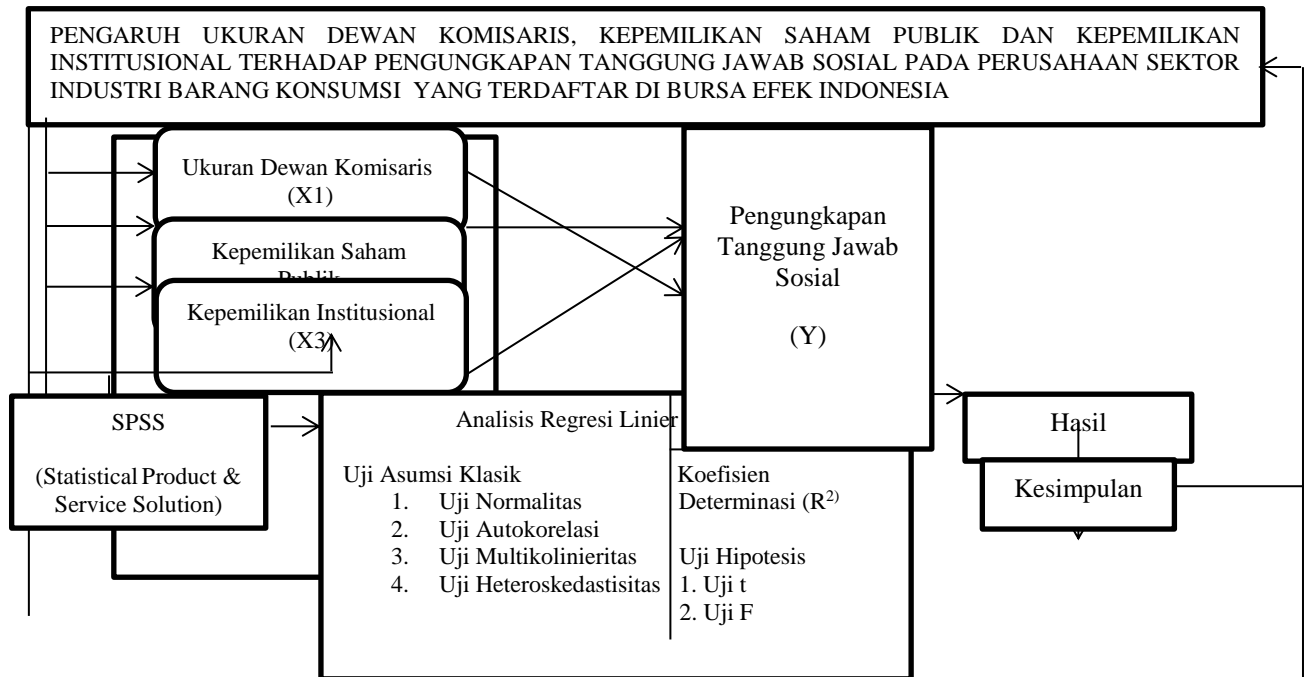
**f. Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pihak- pihak yang berbentuk institusi seperti yayasan, bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dana pension, perusahaan berbentuk perseroan (PT), dan institusi lainnya. Peningkatan kepemilikan institusional menyebabkan pengawasan yang ketat terhadap kinerja manajemen sehingga secara otomatis manajemen akan menghindari perilaku yang merugikan prinsipal. Dirumuskan sebagai berikut :

$$\% \text{ Kep. Institusional} = \frac{\text{jumlah kepemilikan saham oleh pihak institusional}}{\text{jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

## 2. Kerangka Konsep

Suatu kerangka berpikir akan menghubungkan secara teoritis antar variabel penelitian yaitu variabel bebas dan variabel terikat.



Gambar 1. Kerangka Konsep

## 3. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas rumusan masalah yang masih harus dibuktikan kebenarannya secara empiris, maka hipotesis dari penelitian ini adalah :

- H1: Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.  
 H2: Kepemilikan Saham Publik berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.  
 H3: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.

## METODE PENELITIAN

### 1. Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2018 sebanyak 57 perusahaan.

Pemilihan sampel ditentukan secara *purposive sampling* dengan tujuan untuk mendapatkan sampel representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Kriteria untuk dipilih menjadi sampel adalah:

1. Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017-2018
2. Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang memiliki laporan tahunan tahun 2017-2018
3. Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang mengungkapkan tanggung jawab sosial di annual reportnya.

### 2. Operasionalisasi Variabel

#### a. Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

Pengungkapan tanggung jawab sosial adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya

dan interaksinya dengan *stakeholders*, yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum (Darwin, 2008:151). Dan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$CSRDI_j = \frac{\sum x_{ij}}{N_{ij}}$$

#### b. Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran dewan komisaris merupakan jumlah anggota dewan komisaris. Dewan komisaris adalah mekanisme pengendalian intern tertinggi yang bertanggung jawab mengelola perusahaan secara efektif. Ukuran dewan komisaris yang dipakai dalam penelitian ini konsisten dengan Sembiring (2005) yaitu menggunakan jumlah anggota dewan komisaris.

Dan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$UDK = \Sigma \text{ Dewan Komisaris Perusahaan}$$

#### c. Kepemilikan Saham Publik

Kepemilikan publik adalah proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh masyarakat umum/publik dan bukan institusi yang signifikan terhadap saham suatu perusahaan. Publik yang dimaksud adalah individu atau institusi yang memiliki saham suatu perusahaan di bawah 5%. Besarnya saham publik/masyarakat diukur melalui rasio dari jumlah kepemilikan lembar saham yang dimiliki publik terhadap total saham perusahaan di Indonesia. Dan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\% \text{Kep.saham publik} = \frac{\text{Jumlah kepemilikan lembar saham publik}}{\text{Total saham perusahaan}} \times 100\%$$

#### d. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Tarjo, 2008). . Apabila suatu perusahaan mempunyai lebih dari satu kepemilikan institusi yang memiliki saham perusahaan, maka kepemilikan saham diukur dengan menghitung total seluruh saham yang dimiliki oleh seluruh kepemilikan institusi dibandingkan dengan jumlah saham yang beredar (Tamba, 2011). Konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggraini (2006), kepemilikan institusional diukur dengan menggunakan perbandingan antara jumlah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak institusi dengan jumlah saham yang beredar. Dan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\% \text{Kep.Institusional} = \frac{\text{jumlah kepemilikan saham oleh pihak institusional}}{\text{jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

### 3. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Teknik analisis linear berganda berguna untuk menguji pengaruh atau variabel independen terhadap satu variabel dependen. Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen digunakan model sebagai berikut :

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

- Y = Variabel dependen
- $\alpha$  = Konstanta
- X1 = Ukuran Dewan Komisaris
- X2 = Kepemilikan Saham Publik
- X3 = Kepemilikan Institusional
- b1, b2, b3, = Koefisien regresi X1,X2,X3
- e = error atau Variabel Pengganggu.

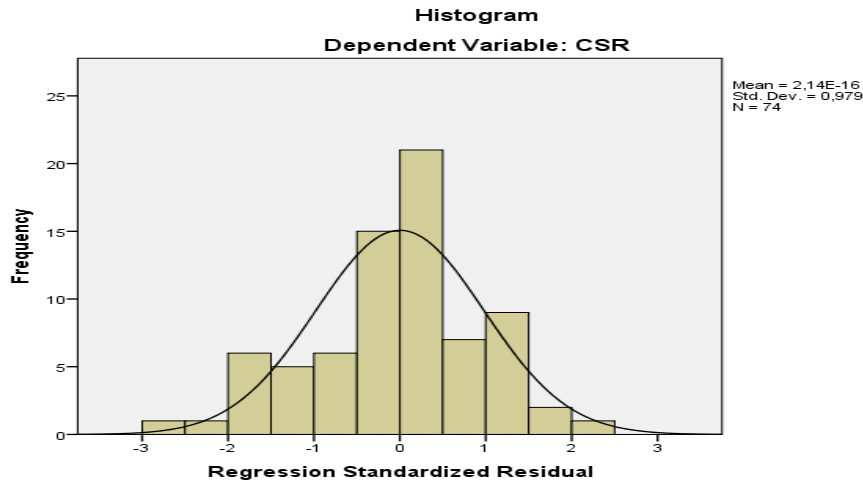
## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengujian Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk memastikan bahwa uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolonieritas dan uji heteroskedastisitas tidak terdapat dalam model yang digunakan dan data yang dihasilkan terdistribusi normal. Uji asumsi klasik dapat dijabarkan sebagai berikut:

**a) Uji Normalitas**

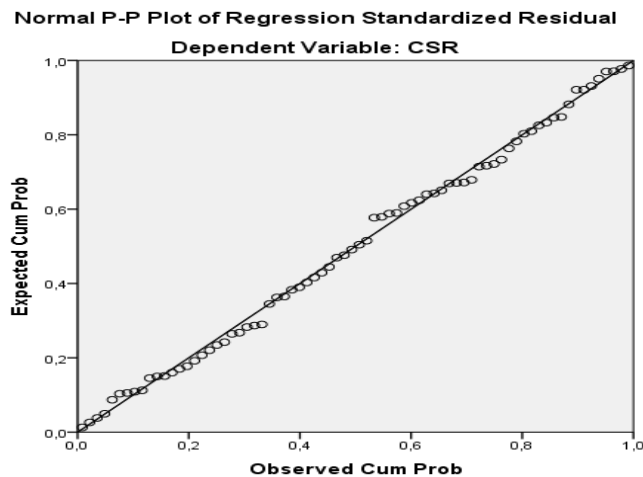
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel dependen dan variabel independen berdistribusi normal.



**Gambar 2. Hasil Uji Normalitas Data dengan Grafik Histogram**

Sumber : Hasil Output SPSS v. 22 (data diolah)

Pada gambar 2. terlihat bahwa variabel terikat yaitu Pengungkapan tanggung jawab sosial mempunyai distribusi normal. Hal ini ditunjukkan bahwa gambar histogram telah berbentuk lonceng dan tidak menceng ke kiri atau ke kanan.



**Gambar 3. Hasil Uji Normalitas Data dengan Grafik Normal P-P Plot**

Sumber : Hasil Output SPSS v. 22 (data diolah)

Pada gambar 3. diatas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan tidak jauh dari garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa data telah terdistribusi normal.

**Tabel 1. Hasil Uji Normalitas Data dengan Uji Kolmogorov-Smirnov One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

	Unstandardized Residual
N	74

Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,08497895
Most Extreme Differences	Absolute	,052
	Positive	,052
	Negative	-,052
Test Statistic		,052
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Hasil Output SPSS v. 22 (data diolah)

Dari tabel 4.1 diatas terlihat bahwa besarnya signifikan lebih dari 5% (0,05) yaitu signifikannya sebesar 0,200 (20%) maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Hasil ini konsisten dengan hasil uji normalitas dengan Grafik Histogram dan Grafik Normal P-P Plot.

### b) Uji Autokorelasi

Autokorelasi menunjukkan adanya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1. Konsekuensinya, variasi sampel tidak dapat menggambarkan variasi populasinya. Akibat yang lebih jauh lagi, model regresi yang dihasilkan tidak dapat digunakan untuk menaksir nilai variabel dependen dari variabel independennya. Untuk mengetahui adanya autokorelasi dalam suatu model regresi, dilakukan pengujian Durbin-Watson (DW) dengan ketentuan yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2. Uji Statistik Durbin-Watson**

Hipotesis nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	No desicision	$dl \leq d \leq du$
Tidak ada korelasi negative	Tolak	$4 - dl < d < 4$
Tidak ada korelasi negative	No desicision	$4 - du \leq d \leq 4 - dl$
Tidak ada autokorelasi positif atau negative	Tidak ditolak	$du < d < 4 - du$

**Tabel 3. Hasil Uji Autokorelasi Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,550 <sup>a</sup>	,302	,273	,0867808	1,866

a. Predictors: (Constant), KI, UDK, KSP

Berdasarkan tabel 4.8 diatas, dapat dilihat bahwa nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 1,866. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan  $\alpha = 5\%$ ,  $n = 74$ ,  $k = 3$ . Berdasarkan tabel DW didapatkan nilai batas bawah (dL)= 1,5397. Dengan demikian nilai (dU)= 1,7079. Dengan demikian nilai  $dU < d < 4-dU$  ( $1,7079 < 1,866 < 2,2921$ ). Hasil tersebut menunjukkan bahwa model yang digunakan tidak ada autokorelasi positif maupun negatif.

### c) Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk mengetahui korelasi linear antara dua atau lebih variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini. Uji ini dilakukan dengan *Tolerance Value* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Agar tidak terjadi multikolonieritas, batas *Tolerance*

Value > 0,10 dan VIF < 10. Adapun hasil uji multikolonieritas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 4. Uji Multikolonieritas Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	,152	,052		4,885	,000		
UDK	,053	,004	,315	2,809	,006	,990	1,011
KSP	-,153	,111	-,167	-1,380	,072	,852	1,173
KI	,271	,444	,074	2,617	,006	,845	1,183

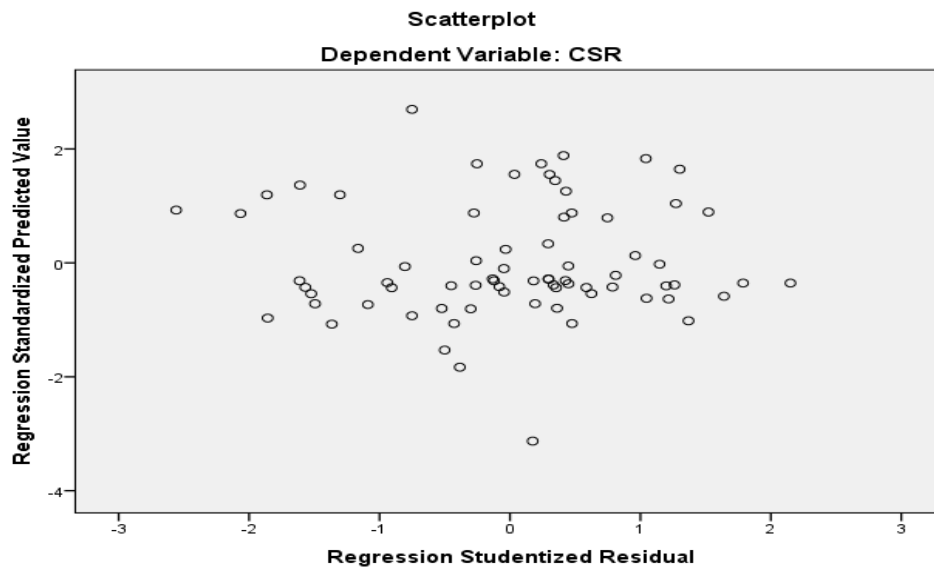
a. Dependent Variable: CSR

Sumber : Hasil Output SPSS v. 22 (data diolah)

Berdasarkan tabel 4. diatas dapat dilihat bahwa *Tolerance Value* > 0,10 dan *VIF* < 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa diantara variabel bebas tersebut tidak terdapat hubungan multikolonieritas. Dari hasil uji ini maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini lolos uji gejala multikolonieritas.

**d) Uji Heteroskedastisitas**

Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana terjadinya ketidaksamaan dari residual pada model regresi. Model regresi yang baik mensyaratkan tidak adanya masalah heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas menyebabkan penafsiran (estimator) menjadi titik efisien dan nilai koefisien determinasi akan menjadi sangat tinggi.



**Gambar 4. Scatterplot**

Sumber : Hasil Output SPSS v.22 (data diolah)

**MODEL PENELITIAN**

**a. Uji Regresi Linier Berganda**

Analisis linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan komisaris, kepemilikan saham publik dan kepemilikan institusional terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Analisis ini diolah dengan program SPSS 22. Hasil analisis regresi linear berganda ditunjukkan pada tabel berikut :



**Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linear Berganda Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,152	,052		4,885	,000
UDK	,053	,004	,315	2,809	,006
KSP	-,153	,111	-,167	-1,380	,072
KI	,271	,444	,074	2,617	,006

a. Dependent Variable: CSR

Sumber : Hasil Output SPSS v. 22 (data diolah)

Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut :

$$\text{Indeks Pengungkapan CSR} = 0,152 + 0,053\text{UDK} - 0,153\text{KSP} + 0,271 \text{KI} + e$$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut dapat dianalisis pengaruh masing-masing variabel independen terhadap Pengungkapan Sukarela yaitu :

1. Nilai konstanta adalah 0,152 artinya jika variabel Ukuran dewan komisaris, kepemilikan saham publik dan kepemilikan institusional bernilai 0, maka pengungkapan tanggung jawab sosial sebesar konstanta yaitu 0,512 atau 51,2%.
2. Nilai Koefisien Ukuran dewan komisaris adalah 0,053 artinya setiap kenaikan ukuran dewan komisaris sebesar 1% maka akan meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosial sebesar 5,3%.
3. Nilai koefisien Kepemilikan saham publik adalah -0,153 artinya setiap kenaikan kepemilikan saham publik sebesar 1% maka akan menurunkan pengungkapan tanggung jawab sosial sebesar -15,3%.
4. Nilai koefisien Kepemilikan Institusional adalah 0,271 artinya setiap kenaikan kepemilikan institusional 1% maka akan meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosial sebesar 27,1%.

**b. Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Analisis determinasi dalam regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh, Ukuran dewan komisaris, Kepemilikan saham publik dan Kepemilikan institusional secara simultan terhadap Pengungkapan tanggung jawab sosial. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen.

**Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,550 <sup>a</sup>	,302	,273	,0867808	1,866

a. Predictors: (Constant), KI, UDK, KSP

b. Dependent Variable: CSR

Basarkan tabel 6 diatas diperoleh nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square) sebesar 0,273 atau 27,3% artinya variabel Independen (Ukuran dewan komisaris, Kepemilikan saham publik dan Kepemilikan institusional) secara simultan mempengaruhi variabel dependen yaitu Pengungkapan tanggung jawab sosial sebesar 27,3% sedangkan sisanya 72,7% (1-0,273 = 0,727) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terungkap atau tidak diteliti dalam penelitian ini.

**4. Pengujian Hipotesis**

**a. Uji Parsial (Uji Statistik t)**

Uji t dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel-variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial (individu). Dengan menggunakan tingkat signifikan ( $\alpha = 5\%$ ), jika nilai signifikan  $t > 0,05$  maka hipotesis ditolak, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial dari variabel independen terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai signifikan  $t < 0,05$  maka hipotesis diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial dari variabel independen dan variabel dependen. Berikut ini adalah hasil pengujian secara parsial (uji t) :

**Tabel 7. Hasil Uji Parsial (Uji t) Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,152	,052		4,885	,000
UDK	,053	,004	,315	2,809	,006
KSP	-,153	,111	-,167	-1,380	,072
KI	,271	,444	,074	2,617	,006

a. Dependent Variable: CSR

Sumber : Hasil Output SPSS v. 22 (data diolah)

Berdasarkan hasil uji statistik pada tabel 7 diatas menunjukkan bahwa Variabel Ukuran dewan komisaris memiliki  $t_{hitung}$  sebesar  $2,809 >$  dari  $t_{tabel}$  yaitu  $1,99394$  dengan tingkat signifikansi sebesar  $0,006 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak, yang berarti bahwa ukuran dewan komisaris secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.

Variabel kepemilikan saham publik memiliki  $t_{hitung}$  sebesar  $-1,380 <$  dari  $t_{tabel}$  yaitu  $1,99394$  dengan tingkat signifikansi sebesar  $0,072 > 0,05$  maka  $H_0$  diterima, yang berarti bahwa kepemilikan saham publik secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.

Variabel kepemilikan institusional memiliki  $t_{hitung}$  sebesar  $2,617 >$  dari  $t_{tabel}$  yaitu  $1,99394$  dengan tingkat signifikansi sebesar  $0,006 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak, yang berarti bahwa kepemilikan institusional secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.

**b. Uji Simultan (Uji Statistik F)**

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama (simultan), signifikansi model regresi secara simultan diuji dengan melihat perbandingan antara  $f$  tabel dengan  $f$  hitung. Selain itu akan dilihat nilai signifikansi, dimana jika nilai signifikan dibawah  $0,05$  maka variabel independen dinyatakan berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil penelitian ini ditunjukkan pada tabel berikut ini :

**Tabel 8 Hasil Uji Simultan (Uji F) ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,229	3	,076	10,118	,000 <sup>b</sup>
	Residual	,527	70	,008		
	Total	,756	73			

a. Dependent Variable: CSR

b. Predictors: (Constant), KI, UDK, KSP

Sumber : Hasil Output SPSS v.22 (data diolah)

Berdasarkan tabel 4.13 diatas menunjukkan bahwa nilai  $sig$  dari model penelitian ini adalah sebesar  $0,000$  dimana  $0,000 < 0,05$  dan  $F_{hitung} 10,118 > F_{tabel} 2,73$  maka  $H_0$  ditolak, artinya

ukuran dewan komisaris, kepemilikan saham publik dan kepemilikan institusional secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengungkapan tanggung jawab sosial.

## PEMBAHASAN

### a. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG (KNKG, 2006). Berdasarkan teori agensi, dewan komisaris dianggap sebagai mekanisme pengendalian intern tertinggi, yang bertanggung jawab untuk memonitor tindakan manajemen puncak. Dikaitkan dengan pengungkapan informasi oleh perusahaan, kebanyakan penelitian menunjukkan adanya hubungan positif antara berbagai karakteristik dewan komisaris dengan tingkat pengungkapan informasi oleh perusahaan (Sulastini, 2007). Semakin besar jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan maka tekanan terhadap manajemen juga semakin besar untuk semakin luas perusahaan tersebut melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial.

Berdasarkan penelitian ini, melalui analisis uji t, ukuran dewan komisaris yang diproksi dengan jumlah anggota dewan komisaris menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dengan nilai sebesar  $2,809 >$  dari  $t_{tabel}$  yaitu  $1,99394$  dengan tingkat signifikansi sebesar  $0,006 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak yang berarti bahwa ukuran dewan komisaris secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial diterima.

Hal ini sesuai dengan teori agensi dan pendapat Coller dan Gregory (1999) dalam Sembiring (2006) semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, semakin mudah untuk mengendalikan *Chief Executives Officer* (CEO) dan semakin efektif dalam memonitor aktivitas manajemen. Jumlah dewan komisaris dalam suatu perusahaan dapat mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial, dimana semakin banyak jumlah dewan komisaris dalam suatu perusahaan maka tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial yang diungkapkan semakin luas, hal ini karena ketika suatu perusahaan memiliki jumlah dewan komisaris yang banyak maka dewan komisaris memiliki power yang kuat untuk menekan manajemen dalam mengungkapkan tanggung jawab sosial.

### b. Pengaruh Kepemilikan Saham Publik terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

Teori *stakeholder* menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi kepentingannya sendiri, tapi juga harus memberikan manfaat bagi *stakeholdernya* (pemegang saham, kreditor, *supplier*, konsumen, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain). Publik sebagai salah satu *stakeholder* juga wajib mengetahui tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Sebagai salah satu *stakeholder*, peran publik sebagai pemegang saham bisa menjadi salah satu dorongan perusahaan untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan. Semakin besar kepemilikan saham oleh publik dalam suatu perusahaan, maka semakin besar pula tanggung jawab perusahaan untuk mengungkapkan tanggung jawab sosialnya (Marpaung, 2009). Hasibuan (2001) menyatakan bahwa rasio kepemilikan publik yang tinggi diprediksikan akan melakukan tingkat pengungkapan sosial yang lebih, hal ini dikaitkan dengan tekanan dari pemegang saham, agar perusahaan lebih memperhatikan tanggung jawabnya terhadap masyarakat. Dikaitkan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial, semakin tingginya rasio kepemilikan saham yang dimiliki masyarakat umum pada suatu perusahaan maka masyarakat yang berperan sebagai pemegang saham akan menekan pihak perusahaan agar perusahaan lebih memperhatikan tanggung jawabnya terhadap masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis uji t untuk Variabel kepemilikan saham publik secara parsial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa kepemilikan saham publik secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial ditolak.

Hal ini bertentangan dengan teori *stakeholder* dimana perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh publik akan melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial yang lebih besar

daripada perusahaan sahamnya tidak dikuasai oleh publik. Berarti bahwa praktik pengungkapan tanggung jawab sosial di Indonesia masih rendah. Kemungkinan hal ini terjadi karena publik sebagai investor yang ingin menanamkan modalnya pada perusahaan tidak memperhatikan Pengungkapan tanggung jawab sosial pada perusahaan tersebut dan lebih mementingkan pergerakan harga saham. Hal ini terjadi dikarenakan kesadaran publik yang masih kurang terhadap tanggung jawab sosial. Publik sebagai investor lebih mementingkan pergerakan harga saham karena mereka ingin mendapatkan return sebesar-besarnya dari investasi yang mereka lakukan. Sehingga tinggi atau rendahnya Pengungkapan tanggung jawab sosial tidak mempengaruhi mereka dalam pengambilan keputusan investasi. Penelitian ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wulantika Oktariani (2013) yang menemukan bahwa kepemilikan saham publik berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.

#### **c. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial**

Teori *stakeholder* Kepemilikan institusional dapat menjadi pendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial (Novita dan Djakman, 2008). Semakin besar kepemilikan institusional pada suatu perusahaan diharapkan pihak institusional dapat bertindak sebagai monitor pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan oleh manajemen juga diharapkan membuat semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan. kepemilikan institusional dapat menjadi pendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial (Novita dan Djakman, 2008). Kepemilikan institusional umumnya dapat bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan. Hal ini berarti kepemilikan institusi dapat menjadi pendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial. Dikaitkan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial, semakin tingginya rasio kepemilikan institusi pada suatu perusahaan maka masyarakat yang berperan sebagai pihak yang akan memonitor pihak manajemen perusahaan dan mendorong untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial.

Berdasarkan hasil analisis uji t untuk variabel kepemilikan institusional secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa kepemilikan saham publik secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial diterima.

Hasil ini sesuai dengan teori *stakeholder*, yang menyatakan bahwa semakin besar kepemilikan institusional dalam perusahaan maka tekanan terhadap manajemen perusahaan untuk mengungkapkan tanggungjawab sosial semakin besar. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional pada perusahaan, maka upaya pengungkapan tanggung jawab sosial akan cenderung

semakin meningkat. Dikarenakan tingginya tingkat kepemilikan institusional akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investorinstitusional, sehingga pihak institusional dapat melakukan pengawasan terhadap kebijakan manajemen secara lebih kuat.

Penelitian ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lusiana Ale (2014) yang menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.

#### **d. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Kepemilikan Saham Publik dan Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial.**

Berdasarkan hasil uji F, Ukuran Dewan Komisaris, Kepemilikan Saham Publik dan Kepemilikan Institusional Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengungkapan Sukarela. Nilai yang ditunjukkan oleh koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) dari model regresi yang digunakan untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel independen (Ukuran dewan komisaris, Kepemilikan saham publik dan Kepemilikan institusional) secara simultan terhadap variabel dependen (Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial). Nilai koefisien korelasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0,091 atau 9,1% artinya variabel Independen (Ukuran dewan komisaris, Kepemilikan saham publik dan Kepemilikan institusional) secara simultan mempengaruhi variabel dependen yaitu Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial sebesar 9,1% sedangkan sisanya 90,9% ( $1-0,091 = 0,909$ ) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terungkap atau tidak diteliti dalam penelitian ini.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Kepemilikan Saham Publik dan Kepemilikan Institusional maka kesimpulan sebagai berikut :

1. Ukuran Dewan Komisaris secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial pada perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Kepemilikan Saham Publik secara parsial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial pada perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Kepemilikan Institusional secara parsial berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial pada perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Ukuran dewan komisaris, Kepemilikan saham publik dan Kepemilikan institusional secara simultan atau secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial pada perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Fr. Reni Retno. 2006. *Pengungkapan Informasi Sosial dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Sosial dalam Laporan Keuangan Tahunan (Studi Empiris pada Perusahaan-Perusahaan yang Terdaftar Bursa Efek Jakarta)*. Simposium Nasional Akuntansi 9. Padang.
- Agusti, Rosalita Rachma dan Aulia Fuad Rahman. 2011. *Relevansi Nilai Laba dan Nilai Buku: Peran Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Dewan Komisaris Independen*. Simposium Nasional Akuntansi 14. Aceh.
- Ale, Lusyana. 2014. *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)*. Skripsi. Yogyakarta : Fakultas Ekonomi, Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Beiner, S., Drobetz, W., et al, 2003, *Is Board size an Independent Corporate Governance Mechanism*, [www.ssrn.com](http://www.ssrn.com) (diakses tanggal 29 Januari 2008).
- Dewi, Indah Fitri Karunia. 2012. “*Analisis Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, Ukuran Perusahaan, dan Porsi Kepemilikan Publik atas Saham Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting pada Perusahaan Jakarta Islamic Index*”. Skripsi Universitas Indonesia.
- Ghozali, Imam, dan Anis Chariri. (2007). *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Machmud, Novita dan Chaerul D. Djakman. 2008. “*Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Luas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (CSR Disclosure) Pada Laporan Tahunan Perusahaan: Studi Empiris Pada Perusahaan Publik Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2006*”. Simposium Nasional Akuntansi 11. Pontianak. 2008.
- Moir, L. 2001. *What Do We Mean By Corporate Social Responsibility, the Measurement of Corporate Social Behavior*. *Journal of Governance* 1-2.
- Mulyadi. 2002. *Auditing Buku 1*, Edisi Keenam. Jakarta : Salemba Empat.

- Nurkhin, Ahmad (2009). “*Corporate Governance dan Profitabilitas; Pengaruhnya Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia).*” Makalah disampaikan pada Simposium Nasional Akuntansi XI, Pontianak, 22-25 Juli
- Oktariani, Wulantika. (2013). *Pengaruh Kepemilikan Publik, Ukuran Dewan Komisaris, Profitabilitas Dan Umur Perusahaan Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Jurnal Ilmiah Akuntansi.* Vol.8, No.2.
- Putra, Eka Nanda dan Rahardjo, Shiddiq Nur. 2011. Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.
- Puspitasari, Apriani Daning. 2009. “*Faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR pada laporan tahunan perusahaan di Indonesia)*”. Skripsi Tidak Dipublikasikan. Universitas Diponegoro.
- Rawi. 2008. “*Pengaruh Kepemilikan Manajemen, Institusi, Dan Leverage Terhadap Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia*”. Tesis S-2 : Universitas Diponegoro Semarang. <http://www.enprints.undip.ac.id>.
- Sembiring, Eddy Rismanda. 2005. “*Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial : Study Empiris pada Perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Jakarta.*” Simposium Nasional Akuntansi 8.
- Solihin, Ismail. 2009. *Corporate Social Responsibility from Charity to Sustainability*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sriayu dan Mimba (2013). Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*
- Sriayu, Gusti Ayu Putu Wiwik dan Ni Putu Sri Harta Mimba. 2013. *Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 5.2 (2013)
- Wijaya, Maria. 2012. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. JIMA, Vol 1 No 1 Januari 2012.
- Wibisono, yusuf. 2007. *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*, Gresik : Fasco Publishing. Yogyakarta : gadjah.
- Zuhroh, D, dan Sukmawati. 2003. Analisis pengaruh luas pengungkapan sosial dalam laporan tahunan perusahaan terhadap reaksi investor (studi kasus pada perusahaan-perusahaan high profile di BEI), *Simposium Nasional Akuntansi VI, Universitas Airlangga, Surabaya*.